**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2000 SERI D NO. 4**

**PERATURAN DAWEAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

- 1 Undang –undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985b tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Negara Nomor 3688);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda[patan dan Belanja Daerah Pelaksana dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daeratah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - 11 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 - 12 Perturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribuisi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 - 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaju dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Milik Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang daerah;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

- 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379, tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
- 28 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang NoMor 4 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN-OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 pruhal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
 2. Hasil pembicaraan dalam rapat-rapat Pnitia Anggaran tanggal 22 Mei dan 8 Juni 2000.
 3. Hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 12 Juni 2000.
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 12 Juni 2000 Nomor 6 Tahun 2000 tentang Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Semarang Tahun 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 225.707.470.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan		Rp. 225.707.470.000,00
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 150.414.666.000,00	
- Pembangunan	Rp. 80.649.751.000,00	
		<hr/>
		Rp. 231.064.417.000,00
		<hr/>
c. DEFISIT		Rp. 5.356.947.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 5.949.750.000,00
b. Belanja	Rp. 5.949.750.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.I, A.II.R dan A.II.P.

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, dimuat dalam lampiran III.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai Tanggal 1 April 2000. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 – 6 – 2000

WALIKOTA SEMARANG